

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Variabel Penelitian

4.1.1 Perkembangan Kemiskinan

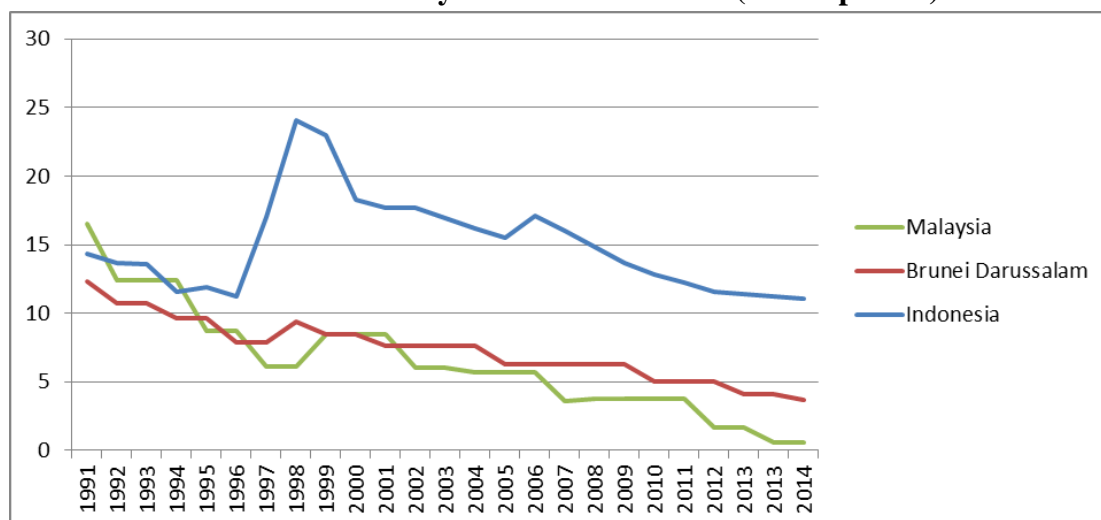
Variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan di Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Kemudian negara menetapkan suatu batas atau garis kemiskinan yang menjadi tolak ukur apakah dengan suatu kondisi masyarakat tersebut tergolong miskin atau tidak (BPS, 2015).

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional yang dihadapi oleh negara untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga upaya untuk mengentaskan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif mencakup berbagai aspek. Menurut Soegijoko (1997, hlm. 137) kemiskinan dapat juga terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Dengan kata lain yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin menderita.

Angka kemiskinan di setiap negara sangat bervariasi, begitu pula kemajuan dan kemunduran yang dihadapinya dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan tersebut. Dibanyaknya negara-negara miskin baru mencapai kemerdekaan pada tahun-tahun sesudah perang dunia kedua, semenjak kemerdekaan tersebut negara berusaha mempercepat pertumbuhannya tetapi hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut sangat besar. Kekurangan modal, taraf pendidikan yang rendah, kegiatan ekonomi tradisional yang rendah produktivitasnya dan pertambahan penduduk yang pesat telah menghambat usaha untuk mempercepat pembangunan, maka keadaan kemiskinan tetap sukar untuk dihapuskan.

Adapun perkembangan kemiskinan yang dibahas pada penelitian ini yaitu di Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia tahun 1991-2015 dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4. 1 Perkembangan Kemiskinan Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia tahun 1991-2015 (dalam persen)



Sumber: BPS, Epu, dan World Bank, data diolah

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan negara Indonesia paling tinggi berada pada tahun 1998 karena adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sedangkan tingkat kemiskinan paling rendah pada tahun 2014. Pada saat pertengahan tahun antara 1994-1996 Indonesia waktu berada di bawah kepemimpinan Pemerintahan orde baru Suharto, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun baik di desa maupun kota karena pertumbuhan ekonomi yang kuat dan adanya program-program penganggulan kemiskinan yang efisien. Selama Pemerintahan Suharto angka penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun drastis, dari awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia sampai pada tahun 1996 hanya mencapai 11% saja.

Namun, ketika pada akhir tahun 1990-an Krisis Finansial Asia terjadi, tingkat kemiskinan di Indonesia melejit tinggi, dari 11 persen menjadi lebih dari 24 persen di akhir tahun 1998, yang berarti prestasi yang sudah diraih Orde Baru hancur seketika. Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2.575,00 menjadi Rp 2.503,00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan

Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5.000,00 per dollar. Bahkan pada Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16.000,00 per dollar. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi.

Pasca krisis ekonomi tahun 1998 seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian nasional dan didukung oleh komitmen kuat pemerintah dalam mengurangi kemiskinan yang diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan pengentasan kemiskinan, persentase penduduk miskin secara umum terus menurun secara konsisten. Secara umum pada periode 1998-September 2016 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan kecuali pada tahun 2006, September 2013, dan Maret 2015. Jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2006 berturut-turut adalah sebesar 39,30 juta atau 17,75%. Jumlah dan persentase tersebut lebih tinggi dibanding kondisi kemiskinan tahun 2005 yang sebesar 35,10 juta penduduk miskin (15,97%). (Afrianto, 2017)

Peningkatan kemiskinan pada tahun 2006 ini dipicu oleh meningkatnya angka inflasi kala itu karena Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dalam negeri, diikuti dengan meningkatnya harga beras selama kurun waktu tersebut. Begitu pula dengan kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin September 2013 dibanding Maret 2013 juga disebabkan oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak pada bulan Juni 2013. Pada Maret 2015 persentase penduduk miskin sedikit mengalami kenaikan dibandingkan September 2014 dan mulai Maret 2015 hingga September 2016 tercatat baik jumlah maupun persentase penduduk miskin mengalami penurunan.

Negara Malaysia secara keseluruhan tingkat kemiskinan yang dihadapi dari tahun 1991 hingga tahun 2015 mengalami penurunan yang di mulai dari 16,5% hingga mampu mencapai 0,6% saja. Berdasarkan rilis Bank Dunia, kinerja pertumbuhan menakjubkan ekonomi Malaysia juga selaras dengan pencapaian yang mengagumkan dalam mengurangi kemiskinan. Selama 40 tahun terakhir,

Malaysia dinilai berhasil mengurangi tingkat kemiskinan absolut dari hampir separuh populasi menjadi hanya sekitar satu persen populasi. (Prayogo, 2016).

Hal ini di dasarkan bahwa pembangunan ekonomi dirancang sejalan dengan program pengurangan jumlah penduduk miskin untuk memperkecil angka ketimpangan pendapatan tanpa mengabaikan aspek keberagaman yang berhasil dihimpun dalam suatu harmoni. Kebijakan New Economic Policy (NEP) dan National Development Policy (NDP) dicapai dengan program penurunan kemiskinan dan restrukturisasi masyarakat Malaysia.

Micro finance program (bagian dari NEP) adalah replikasi dari *GrameenBank's* tujuan utamanya untuk memberikan pinjaman dari pintu ke pintu dalam rangka menjangkau masyarakat miskin yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan formal seperti bank, credit union, koperasi, dan sebagainya. NEP telah tercatat sebagai program pengentasan kemiskinan yang sukses dicanangkan oleh pemerintahan Malaysia dan dalam tiga dekade terakhir, Malaysia mampu menanggulangi kemiskinan, terutama dalam hal *income generation*, pemeliharaan kesehatan, dan pendidikan.

Negara Brunei Darussalam secara keseluruhan tingkat kemiskinan yang dihadapi dari tahun 1991 hingga tahun 2015 mengalami penurunan yang di mulai dari 12,30% hingga mampu mencapai 3,70%. Kemiskinan yang terjadi di negara Brunei Darussalam, negara tetap menjamin rakyat masih mampu menikmati kemudahan fasilitas yang disediakan oleh kerajaan. Untuk tetap mempertahankan kemudahan yang dapat di nikmati rakyat kerajaan terus mengamalkan dasar "*fiscal sustainability*" yaitu mengurus keuangannya secara berhemat supaya mampu dinikmati tidak hanya generasi sekarang, namun juga generasi yang akan datang. Melalui beberapa program yang disediakan Menteri Keuangan seperti Skim Perkhidmatan Masyarakat dan Program Perkasa di bawah Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM). Pemerintah memberikan bantuan keperluan rakyat seperti bantuan kebijakan, pendidikan, sarana hidup serta bantuan bencana alam.

Berbagai bentuk kemahiran dan pendidikan juga diberikan kepada kanak-kanak. Program berdikari, program perkasa termasuk program satu kampung satu produk membantu masyarakat yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau

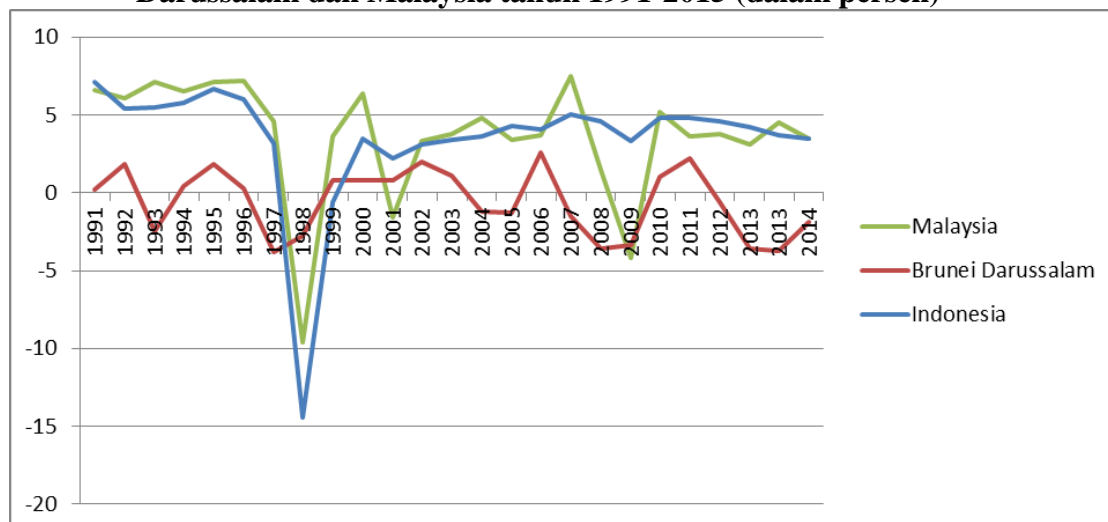
membantu yang tidak mempunyai sumber pendapatan yang diharapkan. Melalui usaha-usaha seperti itu diharapkan mereka akan dapat berdikari dan mendapatkan pendapatan sendiri untuk ke arah kehidupan yang lebih baik. Ini belum lagi termasuk usaha-usaha dan bantuan yang diberikan oleh sektor-sektor swasta dalam bersama-sama menangani kemiskinan yang ada di negaranya.

4.1.2 Perkembangan GDP Per Kapita

Variabel tidak terikat terakhir yang dibahas dalam penelitian ini adalah GDP per kapita. GDP per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. GDP per kapita ini sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara, semakin besar pendapatan per kapitanya maka semakin makmur negara tersebut. Menggunakan data GDP per kapita dalam membandingkan tingkat kemakmuran diberbagai negara pun mempunyai kelemahan. Oleh sebab itu, perbandingan ini harus dipandang sebagai gambaran kasar dari perbedaan tingkat kemakmuran yang dicapai oleh suatu negara. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidaktepatan cara perbandingan itu adalah perbedaan dalam biaya hidup atau *cost of living* di antara berbagai negara.

Sesuai dengan pengertian GDP per kapita itu sendiri untuk menghitungnya diperoleh dengan membagi nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah penduduk suatu tahun tertentu, sehingga besarnya nilai GDP dan jumlah penduduk akan sangat mempengaruhi besarnya GDP per kapita suatu negara. Adapun perkembangan GDP Per Kapita Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia tahun 1991-2015.

Gambar 4. 2 Perkembangan GDP Per Kapita Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia tahun 1991-2015 (dalam persen)



Sumber: World Bank, data diolah

Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa GDP per kapita paling tinggi di Negara Indonesia terjadi pada tahun 1991 sebesar 7,1% sedangkan GDP per kapita paling rendah pada tahun 1998 sebesar -14,4%. Negara Brunei Darussalam mengalami GDP per kapita paling tinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 2,6% sedangkan GDP per kapita paling rendah pada tahun 1997 sebesar -3,8%. Negara Malaysia mengalami GDP per kapita paling tinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 7,5% sedangkan GDP per kapita paling rendah pada tahun 1998 sebesar -9,6%.

Bagi negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia setiap tahunnya dari mulai 1990 hingga 2015 secara mayoritas mengalami penurunan, karena sesuai dengan konsep GDP per kapita itu sendiri bahwa hasil ini didapatkan antara hasil GDP dengan jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk kian hari kian menambah tetapi tidak didukung dengan peningkatan PDBnya maka akan membuat lebih kecil besaran GDP per kapita. Pada kisaran tahun 1997 dan 1998 memiliki GDP per kapita yang mampu mencapai nilai negatif dikarenakan adanya krisis ekonomi sehingga mengganggu kegiatan perekonomian negara. Krisis *financial* Asia yang meletus pada akhir tahun 1990-an mengakibatkan dampak sangat negatif untuk perekonomian, menyebabkan turunnya Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 1998 dan pertumbuhan yang terbatas pada tahun 1999.

Negara Indonesia sendiri pada antara periode 2000-2004 mengalami pemulihan ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan PDB pada 4,6% per tahun.

Setelah itu, pertumbuhan PDB berakselerasi dan memuncak pada 6,5% di 2011, walaupun pada waktu tahun 2009 terjadi penurunan perekonomian kembali akibat guncangan dan ketidakjelasan finansial global. Meskipun terjadi penurunan tajam pada harga-harga komoditas, turunnya pasar saham, yield obligasi domestik dan internasional yang lebih tinggi, dan melemahnya nilai tukar rupiah, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh dengan layak. Kesuksesan ini terutama disebabkan oleh pengaruh ekspor Indonesia yang relatif terbatas terhadap perekonomian nasional, terjaganya kepercayaan pasar yang tinggi, dan berlanjutnya konsumsi domestik yang subur.

Kendati demikian setelah memuncak di 2011, pertumbuhan PDB Indonesia mulai melambat. Ada beberapa faktor yang menjelaskan perlambatan ekonomi ini diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi global yang Lambat fokus pada Republik Rakyat Tiongkok (RRT), menurunnya harga-harga komoditas, tingkat suku bunga bank yang tinggi, serta kondisi perpolitikan Indonesia.

Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, Malaysia merupakan salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat setelah krisis ekonomi 1998 yang mengguncang Asia. Malaysia memiliki keunggulan ekonomi yakni sejumlah elemen makroekonominya stabil, seperti tingkat inflasi dan pengangguran tetap bertahan dibawah angka 3%, serta simpanan pertukaran asing yang sehat. Keadaan seperti itu tentu memungkinkan Malaysia mampu terhindar dari krisis yang sama pada tahun 1998 silam. Meski demikian, untuk prospek jangka panjangnya nampak kurang baik akibat kurangnya perubahan dalam sektor badan hukum yang berurusan dengan utang korporat yang tinggi dan kompetitif.

Sampai pada tahun 2015, mengalami perlambatan ekonomi. Perlambatan ini dipicu oleh pengeluaran swasta yang tertekan oleh kenaikan harga. Alhasil, sentimen konsumen terpukul ke level di bawah level krisis finansial global dan memukul tingkat kepercayaan bisnis. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak sangat bergantung pada permintaan domestik untuk mendongkrak perekonomian seiring terjadinya guncangan ekonomi global.

Derbeda dengan Indonesia dan Malaysia yang harus lebih bekerja keras untuk menaikkan pertumbuhan perekonomiannya, Brunei Darussalam merupakan negara kecil namun makmur sebagai akibat dari adanya kekayaan minyak bumi

yang melimpah. Adanya kekayaan terhadap minyak bumi kemudian menjadikan Brunei sebagai negara yang berada di peringkat ke-149 berdasarkan PDB (Produk Domestik Bruto). Akan tetapi bila kita berbicara PDB per kapita negara Brunei ini menempati posisi kedelapan. Disamping itu, melimpahnya minyak bumi yang ada kemudian berpengaruh pada pesatnya pertumbuhan ekonomi Brunei. Hal ini terlihat dari GDP Brunei pada tahun 2014 yang mencapai 17,1 Milyar sehingga menarik banyak negara seperti Jepang, Indonesia, Australia, Afrika Selatan hingga Amerika Serikat tertarik untuk bermitra dagang dengan Brunei.

4.1.3 Perkembangan Sumber Daya Insani (SDI)

Variabel tidak terikat kedua yang dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Sumber Daya Insani (SDI) atau yang lebih kita sering kenal dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengertian secara mikro dapat diartikan sebagai individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu institusi sedangkan secara makro dapat diartikan sebagai penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Pengertian lainnya menurut Sudono (2011, hlm. 173) bahwa Sumber Daya Insani (SDI) adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut mengandung makna bahwa besar kecilnya potensi bisnis suatu perusahaan bahkan secara makro berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh kualitas maupun kuantitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya insani tersebut dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Indeks yang dikeluarkan terakhir oleh UNDP bahwa posisi Negara Brunei Darussalam

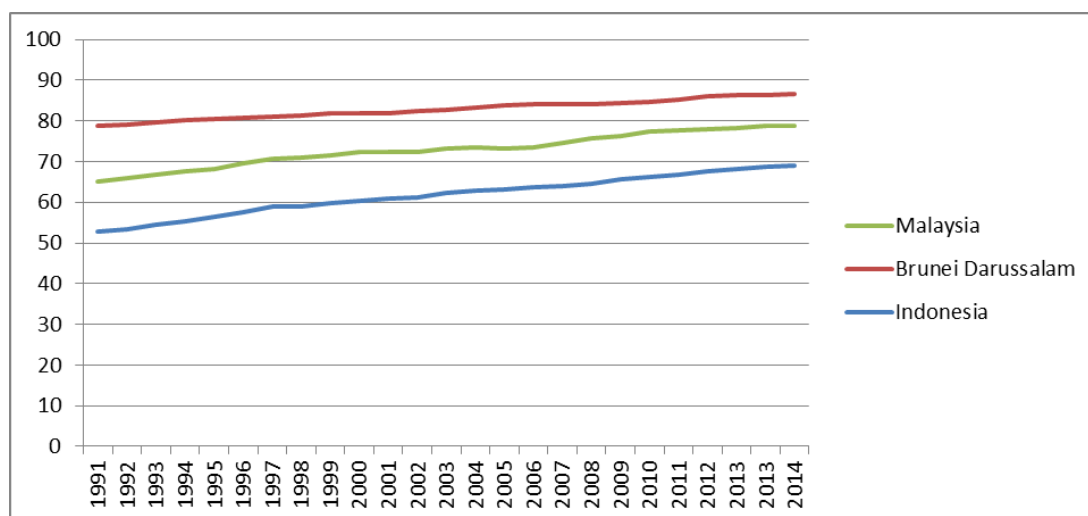
berada diperingkat ke 31, Malaysia diperingkat ke 59 dan Indonesia diperingkat ke 113 dari 188 negara di dunia.

Daftar negara menurut Indeks Pembangunan Manusia Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Peta dunia berwarna mengindikasikan Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

- a. 0.000-0.499 kelompok pembangunan manusia rendah (negara tidak berkembang).
- b. 0.500-0.799 kelompok pembangunan manusia menengah (negara berkembang).
- c. 0.800-0.899 kelompok pembangunan manusia tinggi (negara berkembang).
- d. 0.900-1.000 kelompok pembangunan manusia sangat tinggi (negara maju).

Adapun perkembangan Sumber Daya Insani (SDI) di Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia tahun 1991-2015 dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Perkembangan Sumber Daya Insani Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia tahun 1991-2015 (dalam persen)



Sumber: UNDP, data diolah

Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa tingkat sumber daya insani paling tinggi di Negara Indonesia terjadi pada tahun 2015 sebesar 68,9% sedangkan sumber daya insani paling rendah pada tahun 1991 sebesar 52,8%. Negara Malaysia tingkat sumber daya insani paling tinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 78,9% sedangkan sumber daya insani paling rendah pada tahun 1991 sebesar 65,1%. Terakhir untuk Negara Brunei Darussalam tingkat sumber daya

insani paling tinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 86,50% sedangkan sumber daya insani paling rendah pada tahun 1991 sebesar 78,70%.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) untuk 2015 adalah 0.689. Ini menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah, dan peringkat 113 dari 188 negara dan wilayah (UNDP, 2017). Nilai IPM meningkat 30,5 persen dari nilai pada tahun 1990, dengan peningkatan rata-rata 1,07% per tahun. Hal ini mencerminkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam hal harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun bersekolah, harapan lama bersekolah dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita selama periode tersebut. Hal ini menempatkan Negara Indonesia berada pada kisaran negara-negara sedang berkembang dengan tingkat pembangunan manusia level menengah, padahal pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara.

Melihat kondisi tersebut, setidaknya terdapat 2 hal yang menarik dari laporan pembangunan manusia 2016 ini. Pertama terkait penggunaan IPM dengan penyesuaian ketimpangan (*inequality adjusted human development index*). Tingginya angka ketimpangan di Indonesia dapat berdampak pada nilai IPM yang lebih rendah setelah disesuaikan dengan angka ketimpangan. Semakin tinggi angka ketimpangan, semakin rendah nilai IPM dengan penyesuaian ketimpangan. Kedua, dalam laporannya, UNDP menjelaskan bahwa meskipun usia harapan hidup (*life expectancy*) negara-negara di dunia terus naik secara dramatis, namun tidak diikuti oleh kenaikan usia harapan hidup sehat (*healthy life expectancy*) secara signifikan

Apabila angka kesenjangan diperhitungkan, maka IPM Indonesia menurun tajam ke 0,563 (turun 18,2 persen). Kesenjangan pendidikan dan harapan hidup saat lahir di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata di Asia Timur dan Pasifik, namun Indonesia lebih baik dalam hal kesenjangan pendapatan dan gender dibandingkan dengan rata-rata di kawasan ini. Kesetaraan gender adalah pendorong utama pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2014, data yang terpilah menurut jenis kelamin diperkenalkan ke dalam IPM, yang memungkinkan UNDP untuk menghitung dan membandingkan IPM untuk laki-laki dan IPM untuk perempuan (UNDP, 2017)

Sementara itu, untuk negara Malaysiadi tahun 2015 telah berhasil menduduki peringkat ke 64 dengan angka indeks 78.9% pada IPMnya. Menurut pembagian level IPM yang dilakukan UNDP dengan angka 0,769 tersebut maka Malaysia sudah termasuk dalam negara yang tingkat pembangunan manusianya tinggi (*high level*). Tidak heran jika Malaysia masih sangat percaya diri bahwa pada tahun 2020 mereka akan masuk ke dalam kategori negara maju.

Ada tiga faktor utama yang menopang pencapain Malaysia ini. Pertama, dari segi Angka harapan hidup. Angka harapan hidup di Malaysia mencapai 74.5 tahun. Jika dibandingkan dengan angka tertinggi harapan hidup yang dikeluarkan UNDP (sebesar 85 tahun) maka angka tersebut sudah mendekati level tertinggi. Kondisi di Malaysia sendiri sejauh ini tidak mengalami peperangan, bencana alam atau penyakit menular yang cukup parah sehingga dapat menyebabkan angka harap hidupnya turun.

Kedua, dari tingkat pendidikan. Dalam mengukur tingkat pendidikan digunakan dua indikator yakni tingkat melek huruf dan partisipasi sekolah. Malaysia sejauh ini jika dilihat dari kedua indikator tersebut yakni dengan tingkat melek huruf 94 persen dan tingkat partisipasi sekolah sebesar. Angka tersebut tentu saja sudah termasuk dalam kategori high. Ketiga, dari segi pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita Malaysia berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) pada 2012 adalah sebesar \$ 13,676. Angka tersebut menunjukkan bahwa Malaysia telah masuk high income country. Melalui ketiga inidikator utama diatas, Malaysia memang secara keseluruhan dapat dikatakan telah masuk kedalam high HDI level. Untuk mencapai very high HDI level kemungkinan besar pada 2020 Malaysia belum akan bisa secara penuh mencapai targetnya.

Kemudian untuk yang terakhir Brunei Darussalam memiliki Indeks Pembangunan Manusia mencapai 86.50% pada tahun 2015. Hal ini menjadikan Negara Brunei Darussalam memiliki peringkat HDI tertinggi diantara negara mayoritas muslim ASEAN dan berada di posisi 31 diantara 188 Negara dan menjadi Negara dengan nilai HDI tertnggi kedua di Asia tenggara setelah Negara Singapura. Dari tahun 1990-2014 HDI Negara Brunei Darussalam meningkat dari 0.796 menjadi 0.865 dann menjadi negara dengan pembangunan manusia sangat tinggi.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia mengalami kenaikan dari setiap tahun ke tahun untuk IPM ketiga negara tersebut dan pada tahun 2015 mampu mencapai tingkat IPM paling tinggi. Hal ini berarti tingkat IPM mencerminkan adanya kemajuan yang telah dicapai negara dalam hal harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun bersekolah, harapan lama bersekolah dan pendapatan nasional bruto per kapita selama periode tersebut. Pertumbuhan tersebut memungkinkan manusia untuk mengalokasikan pengeluaran untuk pelayanan kesehatan dan pendidikannya. Selain mengalami IPM yang paling tinggi, ketiga negara tersebut mengalami masa dimana tingkat IPM menurun pada kisaran tahun 1990-1991 hal ini dikarenakan adanya krisis ekonomi yang melanda setiap negara. Adanya krisis ini berasal dari krisis *financial* dan ketidakstabilan ekonomi menjadi pembelajaran berharga untuk terus memperbaiki kualitas manusia.

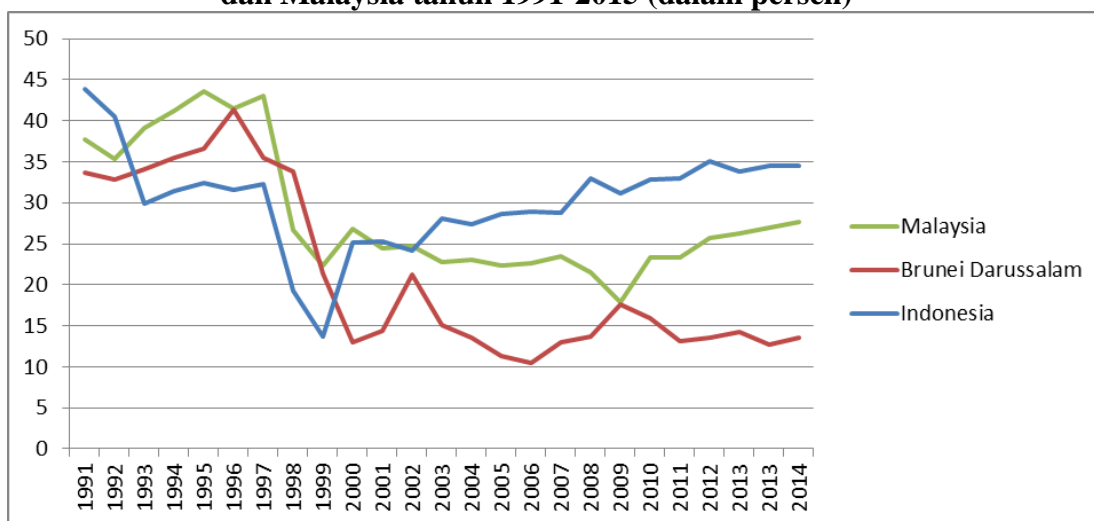
4.1.4 Perkembangan Investasi

Variabel investasi merupakan salah satu variabel tidak terikat yang dibahas dalam penelitian ini. Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal yang merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Jika pengusaha mengeluarkan uangnya untuk membeli barang-barang modal maka pengeluaran tersebut dinamakan investasi. Dengan demikian investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2004, hlm. 121).

Investasi sebagai kekayaan yang menyediakan sumber daya untuk keperluan yang dapat menentukan keadilan dan pembangunan. Kekayaan bergantung pada aktivitas ekonomi, luasnya pasar, insentif dan fasilitas yang disediakan oleh negara yang gilirannya bergantung pada tabungan atau kelebihan sesudah pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat. Semakin besar pendapatan akan memberikan kontribusi yang semakin besar pula pada tabungan dan semakin besar investasi pada peralatan dan gilirannya akan memberikan kontribusi yang

lebih besar kepada pembangunan dan kekayaan. Investasi juga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dimaksudkan akan mendorong terhadap kenaikan tingkat pendapatan sehingga memberikan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan pajak dan memungkinkan pemerintah mengeluarkan anggaran yang lebih untuk kesejahteraan masyarakat. Kekayaan juga bergantung pada pembagian kerja dan spesialisasi, semakin besar pembagian kerja dan spesialisasi semakin tinggi kekayaan namun pembagian kerja ini tidak dapat direalisasikan sehingga terdapat pasar yang diregulasi dengan baik yang memungkinkan semua orang memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, investasi menjadi faktor penting untuk mengatasi masalah kemiskinan. Adapun perkembangan investasi di Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia tahun 1991-2015 dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4. 4 Perkembangan Investasi Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia tahun 1991-2015 (dalam persen)



Sumber: IMF World Economic Outlook (WEO), data diolah

Berdasarkan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa tingkat investasi paling tinggi di Negara Indonesia terjadi pada tahun 1991 sebesar 43.88% peningkatan ini terjadi satu tahun setelah kebijakan investasi paket 6 Mei 1986 diberlakukan dan investasi ini karena didorong oleh penanaman modal asing (PMA) sedangkan investasi paling rendah pada tahun 1999 sebesar 13,64% sebagai akibat dari adanya krisis ekonomi yang menyebabkan kegiatan investasi termasuk penanaman modal asing menjadi sangat berkurang.

Investasi yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah investasi asing, yaitu Perusahaan Phillips dari Belanda. Merek dagang lampu Philips pada masa itu sangat terkenal di Indonesia sehingga mereka memiliki alasan yang kuat untuk masuk ke Indonesia. Lalu, modal asing yang kedua masuk ke Indonesia adalah PT. Freeport Indonesia. Investasi yang ditanamkan dalam perusahaan ini adalah di bidang pertambangan. Pada masa Orde Baru ini, arus investasi menjadi meningkat. Hingga pada tahun 1997 menjadi awal bagi pertumbuhan negatif investasi asing, kemudian tahun 1999 menorehkan catatan buruk bagi investasi dengan terjadinya defisit, yang terus berlanjut hingga tahun 2003. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, aliran investasi yang masuk ke Indonesia sangat minim, padahal di negara lain aliran investasi asing masih positif walaupun terkena imbas krisis. Faktor penyebab utama rendahnya investasi yang masuk ke Indonesia adalah adanya anggapan dari para investor bahwa Indonesia merupakan negara yang belum aman dalam menanamkan investasinya karena belum stabilnya kondisi bangsa Indonesia.

Untuk Malaysia tingkat investasi paling tinggi terjadi pada tahun 1995 sebesar 46.92% hal ini didukung oleh percepatan belanja domestik dan pulihnya ekonomi global terutama di negara maju serta perluasan investasi baru terhadap perusahaan asing sedangkan investasi paling rendah tahun 2009 sebesar 18.93% karena adanya krisis ekonomi dimana ekonomi Malaysia menunjukkan proyeksi negatif ditandai dengan meningkatnya investasi asing namun cadangan devisa negara justru menurun.

Negara Malaysia menerapkan kebijakan The New Economic Policy sebagai program yang bertujuan untuk memusnahkan kemiskinan rakyat Malaysia dan merestrukturisasi masyarakat Malaysia sehingga identifikasi ras dengan fungsi ekonomi dan lokasi geografi perlahan dikurangi, dan kedua tujuan tersebut direalisasikan melalui ekspansi ekonomi yang cepat. Pada tahun 1995 Negara Malaysia memiliki nilai investasi yang tinggi hal ini merupakan hasil dari The First Industrial Master Plan 1986 - 1995. Look East Policy mencapai titik puncaknya dalam the First Industrial Master Plan - 1986-1995. IMP 1 ditujukan untuk menyediakan cetak biru percepatan pembangunan industri. Percepatan pembangunan dicapai dengan cara mentransformasi struktural ekonomi dari

ketergantungan tinggi pada produksi dan ekspor komoditi primer menjadi ekonomi industri lebih canggih. Cetak biru ini menandai bahwa pertama kalinya usaha yang serius dalam perumusan kebijakan industri eksplisit dalam upaya memenuhi target pertumbuhan sektoral.

IMP 1 memprogram industrialisasi ke dalam dua dimensi, yaitu industri berdasarkan sumber alam dan industri non-sumber alam. Industri yang mengolah hasil alam yang berskala besar antara lain industri pengolahan minyak kelapa, kayu gelondong, karet dan industri gas alam. Industri-industri non-sumber alam lebih berhasil dalam menciptakan nilai tambah karena didorong oleh besarnya arus FDI yang masuk. Banyak industri yang memproduksi barang-barang otomobil, elektronik yang bermula berkembang dari perakitan sederhana hingga menjadi industri memiliki nilai tambah tinggi. Industri lainnya yang juga meningkatkan nilai tambah secara berjenjang adalah mesin, produk logam, peralatan transportasi, plastik dan logam dasar.

Keberhasilan terbesar IMP 1 didukung oleh the Promotion of Investment Act 1986 (PIA). Perkembangan ekonomi Negara Malaysia memasuki tahun 1990-1995 mengalami peningkatan yang pesat. Pertumbuhan tahun 1995 didukung oleh percepatan belanja domestik dan pulihnya ekonomi global terutama di negara-negara maju. Pertumbuhan yang kuat dalam kemampuan memenuhi permintaan dan kapasitas produksi yang luas, sektor manufaktur memberi kontribusi besar dalam GDP sepanjang 1990-1995, sementara itu kontribusi sektor primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan) dalam GDP tahun 1990-1995 mengalami penurunan dari 18,7% menjadi 13,65%; sektor pertambangan mengalami penurunan dari 9,8% menjadi 7,4%; sektor manufaktur meningkat dari 26,9% menjadi 33,1%. (Ministry of Finance, Malaysia Economic Report 1995/6).

Pada tahun 2009 Negara Malaysia mengalami penurunan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi Malaysia kemungkinan terjungkal ke level yang cukup rendah sepanjang delapan tahun terakhir ini pada tahun 2009 karena surplus perdagangan semakin sempit di tengah lambatnya permintaan ekspor dan rendahnya harga-harga komoditi. Hal ini diungkapkan oleh Morgan Stanley.

Perekonomian senilai US\$ 181 miliar tumbuh di Malaysia pada level yang cukup lambat di kuartal terakhir selama tiga tahun ini, kemudian mendesak Bank

Sentral untuk memangkas suku bunganya untuk yang pertama kalinya sejak 2003 pada 24 November 2008 lalu. Pemerintah Malaysia mengumumkan rencananya untuk menggelindingkan proyek publik senilai 7 miliar ringgit atau setara dengan US\$ 2 miliar untuk menyokong pertumbuhan. Perlambatan ini disebabkan oleh guncangan eksternal dalam perekonomian dan kehati-hatian sektor swasta untuk melakukan investasi di berbagai sektor, padahal permintaan domestik akan terus menjadi pendorong utama pertumbuhan, ditambah lagi terutama oleh belanja sektor swasta. Hal ini menekankan upaya pemerintah Malaysia untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan memberi dukungan yang diperlukan untuk memacu pertumbuhan pendapatan dan belanja sektor swasta.

Negara Brunei Darussalam tingkat investasi paling tinggi terjadi pada tahun 1996 sebesar 41,31%, hal ini didukung bahwa perekonomian Negara Brunei Darussalam di dominasi oleh industri minyak dan gas sejak 80 tahun yang lalu. Ini merupakan salah satu bisnis ekonomi yang sangat mendominasi negara tersebut. Pemerintah Brunei Darussalam juga menetapkan harga pajak pendapatan atau pendapatan pribadi dengan angka yang rendah, dan mampu memberikan banyak subsidi kepada warga negaranya. Selain mengembangkan sumber daya alamnya yang disadari semakin lama akan semakin menurun, negara ini juga telah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mampu bersaing untuk kedepannya dengan penerapan subsidi sekolah gratis hingga tingkat Universitas. Negara Brunei Darussalam pun memiliki sistem politik stabil, suara makro ekonomi dan sangat baik infrastruktur termasuk pendidikan, kesehatan, transportasi dan kesehatan, lingkungan kuat serta pasokan stabil dari air dan listrik yang menyebabkan Negara Brunei menjadi pilihan menarik bagi calon investor.

Pemimpin-pemimpin Brunei khawatir akan integrasi yang meningkat secara perlahan tapi pasti di dunia ekonomi akan mengikis kohesi sosial internal, walaupun Brunei telah menjadi pemain yang penting dengan menjadi Ketua untuk forum APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) tahun 2000. rencana untuk masa depan termasuk meningkatkan sumber daya manusia, mengurangi pengangguran, memperkuat sector perbankan dan pariwisata, dan, secara umum, terus memperluas basis ekonomi di luar minyak dan gas.

Investasi Negara Brunei Darussalam paling rendah terjadi pada tahun 2006 yaitu hanya sebesar 10,44%. Brunei berencana memperluas kapasitas pemurniannya karena perusahaan Tiongkok, Zhejiang Hengyi Group, tengah membangun fasilitas pemurnian baru berkapasitas 148.000 bbl/d yang dijadwalkan beroperasi pada tahun 2019. Fasilitas baru ini akan mengubah dinamika ekspor minyak di negara tersebut dengan lebih banyak mengonsumsi minyak mentah dan mengekspor lebih banyak produk bahan bakar.

Melalui perusahaan gabungan yang telah lama didirikan bersama Royal Dutch Shell, Brunei telah memproduksi minyak dan gas alam untuk beberapa dekade terutama dari dua lapangan besar yaitu Ampa Barat Daya dan Champion yang berada di lepas pantai Delta Baram. Setelah mencapai jumlah 200.000 barel per hari (bbl/d) pada tahun 2006, produksi bahan bakar Brunei dan bahan cair lainnya menurun hampir setengahnya atau sebesar 124.000 bbl/d pada tahun 2014.

4.1.5 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dibidang Pendidikan

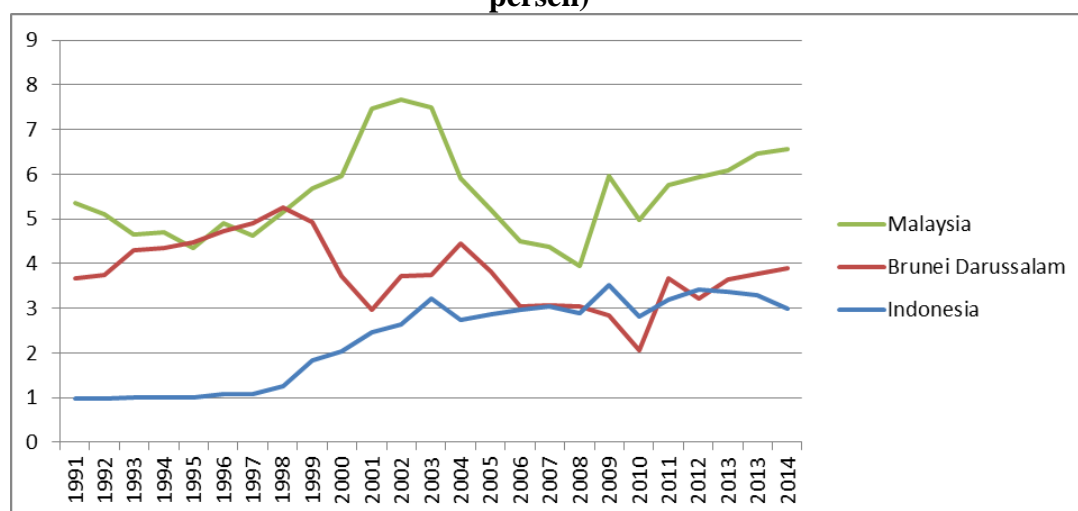
Variabel tidak terikat yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dari APBN untuk daerah dan regional (Sukirno, 2001, hlm. 155). Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Adanya pengeluaran pemerintah ini akan mencerminkan suatu kebijakan dari pemerintah. Jika pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia karena hal ini berkaitan dengan kepentingan umum untuk kesejahteraan masyarakat, seperti halnya yang dikemukakan oleh Misdawita (2013, hlm. 148) antara lain yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, pengeluaran subsidi, perilaku rumah

tangga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta aspek penting lainnya yang berperan untuk pengurangan angka kemiskinan. Berdasarkan beberapa aspek yang ada sudah disebutkan, aspek pengeluaran adalah aspek yang krusial bagi pemerintah, sebab besaran dari pengeluaran ditetapkan secara langsung oleh pemerintah dan pada akhirnya dapat mempengaruhi angka kemiskinan.

Berikut ini perkembangan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam tahun 1991-2015 dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Gambar 4.5 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dibidang Pendidikan Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia tahun 1991-2015 (dalam persen)



Sumber: World Bank, *Health Nutrition and Population Statistics*, data diolah

Berdasarkan Gambar 4.5 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan paling tinggi di Negara Indonesia terjadi pada tahun 2009 sebesar 3,53% sedangkan paling rendah pada tahun 1991 dan 1992 sebesar 0,97%. Negara Malaysia pengeluaran pemerintah bidang pendidikan paling tinggi terjadi pada tahun 2002 sebesar 7,66% sedangkan paling rendah pada tahun 2008 sebesar 3,96%. Negara Brunei Darussalam pengeluaran pemerintah bidang pendidikan paling tinggi terjadi pada tahun 1998 sebesar 5,25% sedangkan paling rendah pada tahun 2010 sebesar 2,05%.

Apabila kita tengok kembali kondisi pendidikan di Indonesia, Sistem sekolah Indonesia sangatlah luas dan bervariasi. Dengan lebih dari 50 juta siswa dan 2,6 juta guru di lebih dari 250.000 sekolah, sistem ini merupakan sistem pendidikan

terbesar ketiga di wilayah Asia dan bahkan terbesar keempat di dunia (berada di belakang China, India dan Amerika Serikat). Dua menteri bertanggung jawab untuk mengelola sistem pendidikan, dengan 84 persen sekolah berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan sisa 16 persen berada di bawah Departemen Agama (Depag). (World Bank, 2014).

Pendidikan merupakan hal penting bagi agenda pembangunan Pemerintah Indonesia. Belanja pendidikan telah meningkat secara signifikan di tahun-tahun terakhir setelah terjadinya krisis ekonomi. Menurut data World Bank juga, secara nyata belanja pendidikan meningkat dua kali dari tahun 2000 sampai 2006. Di tahun 2007, belanja untuk pendidikan lebih besar daripada sektor lain, yang mencapai nilai US\$14 miliar, atau lebih dari 16 persen dari total pengeluaran pemerintah, jumlah ini setara dengan jumlah di negara lain yang sebanding.

Pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya melalui peraturan perundang-undangan. Undang-Undang mengenai Pendidikan Nasional (No. 20 Tahun 2003) dan Amandemen Konstitusi III menekankan bahwa semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan; bahwa Pemerintah wajib untuk membiayai pendidikan dasar tanpa biaya; dan bahwa Pemerintah diberi mandat untuk mengalokasikan 20% dari pengeluarannya untuk pendidikan. Yang sangat mendasar isi perubahan pasal 31 ini adalah besaran minimal 20% dari APBN harus dialokasikan untuk pendidikan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan sektor pendidikan bagi rakyat Indonesia tercermin dalam pasal ini. Namun, dalam implementasinya pemerintah menemukan beberapa kendala, sehingga pagu minimal 20% tersebut tidak dapat langsung dialokasikan dalam APBN tahun berikutnya.

Peraturan tersebut pada kenyataannya baru bisa di realisasikan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 tahun 2008. Isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional dan diputuskan bahwa gaji pendidik masuk dalam anggaran pendidikan 20%. Putusan ini diwujudkan pemerintah dalam menyusun RAPBN 2009.

Dalam APBN 2009, pemerintah untuk pertama kali berhasil menetapkan anggaran pendidikan mencapai minimal 20% dari APBN. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara. Dengan perbandingan tersebut jumlah anggaran pendidikan akan naik secara proporsional dengan meningkatnya jumlah anggaran belanja negara.

Selain itu juga pemerintah terus mengadakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di tahun 2005, Pemerintah meluncurkan program yang disebut BOS (Biaya Operasional Sekolah), sebagai cara untuk menyampaikan dana secara langsung ke sekolah-sekolah agar anak-anak tetap bersekolah dan memberi sekolah kebebasan dalam mengelola dana mereka sendiri. Untuk masyarakat yang kurang miskin pemerintah juga memberikan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bidik Misi.

Apabila Indonesia menerapkan anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan pada tahun 2009, maka berbeda dengan Malaysia. Menurut data Human Development Report (UNDP, 2006), pengeluaran publik untuk pendidikan di Malaysia tahun 1990 sebesar 18,3% dari total pengeluaran pemerintah. Untuk tahun 2000-2002, pemerintah Malaysia menganggarkan untuk bidang pendidikan sebesar 20,3% dari total pengeluaran negara. Pemerintah bersama masyarakat Malaysia meyakini bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak akan pernah merugikan. Sejak pemerintahan Mahathir Muhammad, terdapat pembagian dua pilar utama pembangunan Malaysia, yaitu pertahanan dan pendidikan. Artinya, pemerintah mengedepankan pendidikan sebagai penyokong utama sebuah negara untuk menuju kesuksesan pembangunan Malaysia.

Target Malaysia menjadi negara maju pada tahun 2020 membutuhkan keberhasilan dari kualitas sistem pendidikan. Tak heran jika realisasi anggaran pendidikan di Malaysia sekitar 20-40% dari keseluruhan APBN (terbesar kedua

setelah anggaran pertahanan). Bahkan, masih ada lagi tambahan beberapa persen dari APBD yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap daerah.

Dari segi undang-undang, Malaysia memberlakukan aturan yang ketat yang mewajibkan semua rakyat Malaysia bersekolah. Ada hukuman penjara bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya pada usia sekolah yaitu sejak usia 6 tahun. Karenanya, sekolah-sekolah negeri digratiskan hingga setingkat SMA. Hanya ada uang iuran yang kurang lebih 300 RM (Ringgit Malaysia) selama setahun bagi keluarga mampu.

Di tingkat universitas, pemerintah memberikan subsidi hingga 75% dari biaya yang seharusnya dibayar, kepada seluruh mahasiswanya. Sisa biaya, sebesar 25%, bisa dipenuhi secara swadaya ataupun dengan memanfaatkan bantuan pendidikan. Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan agar setiap institusi pendidikan tinggi yang berada di Malaysia, setidaknya memberikan 2 jenis bantuan bagi mahasiswanya, yaitu beasiswa dan PTPTN (Perbadanan Tabung Perguruan Tinggi Nasional). PTPTN merupakan pinjaman dengan bunga 3% yang diberikan kepada warga negara Malaysia yang ingin melanjutkan pendidikan di universitas. PTPTN adalah program lain dari pemerintah Malaysia bagi mahasiswa yang tidak mampu membiayai pendidikan di universitas.

Sementara itu di negara Brunei Darussalam, pemerintah Brunei Darussalam merumuskan model pendidikan yang objektif yaitu pendidikan sebagai wadah untuk melahirkan rakyat yang taat beragama dimana mereka akan menjadi pelita umat yang mempunyai pemahaman dan pegangan yang benar. Kearah itulah, maka pemerintahan Brunei Darussalam turut berharap supaya manusia yang dirancang dan akan lahir yaitu menjadi manusia Brunei yang berilmu, mahir dan beramal salih.

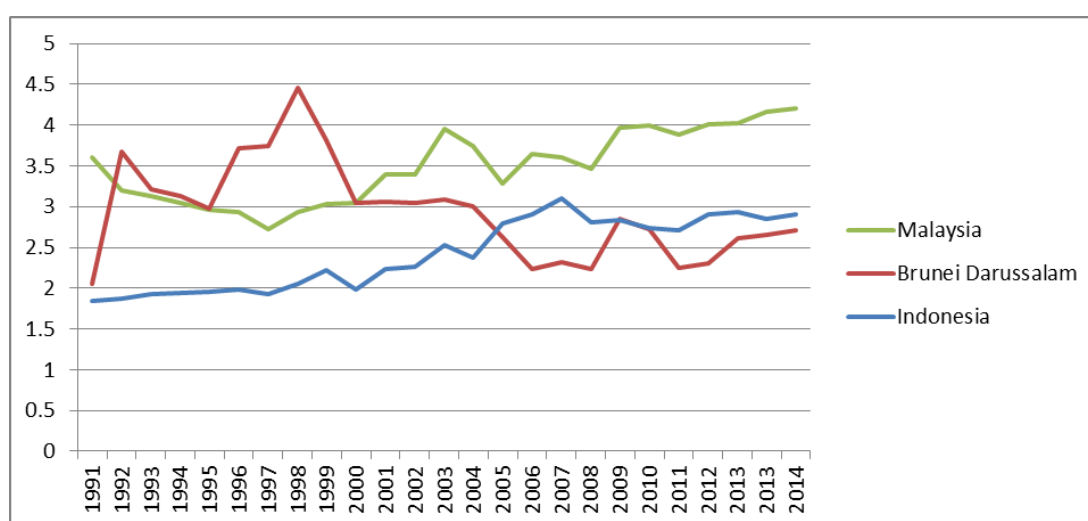
Pemerintah Brunei menetapkan tiga bidang utama dalam pendidikan, yaitu: sistem dwi bahasa di sekolah, konsep Melayu Islam Beraja dalam kurikulum sekolah dan peningkatan sumber daya manusia termasuk pendidikan kejuruan dan teknik. Sistem pendidikan umum di Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara *commonwealth* lainnya, seperti Inggris, Malaysia dan Singapura. Sistem ini menggunakan pola A7-3-2-2 yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan pendidikan, seperti 7 tahun

tingkat dasar, 3 tahun tingkat menengah pertama, 2 tahun tingkat menengah atas, dan 2 tahun pra universitas.

4.1.6 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dibidang Kesehatan

Variabel tidak terikat terakhir yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan. Sama halnya dengan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, pengeluaran pemerintah dibidang kesehatanpun tak kalah penting. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia. Kesehatan menjadi salah satu komponen dalam penghitungan tingkat pembangunan manusia (human development index atau HDI) antar negara di dunia. Dua komponen lain dari HDI adalah tingkat pendapatan per kapita dan pendidikan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, diperlukan pembangunan kesehatan yang meliputi seluruh aktivitas pembangunan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam rangka mewujudkan/ mendukung target pembangunan nasional di bidang kesehatan. Maka dari itu setiap negara perlu adanya alokasi anggaran untuk kesehatan. Adapun perkembangan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam tahun 1991-2015 dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Gambar 4. 6 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dibidang Kesehatan Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia tahun 1991-2015 (dalam persen)



Sumber: World Bank, Health Nutrition and Population Statistics, data diolah

Berdasarkan Gambar 4.6 di atas, Nampak bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan paling tinggi di Negara Indonesia terjadi pada tahun 2007 sebesar 3,1% sedangkan paling rendah pada tahun 1991 sebesar 1,85%. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan paling tinggi di Negara Malaysia terjadi pada tahun 2015 sebesar 4,21% sedangkan paling rendah pada tahun 1997 sebesar 2,72%. Dan untuk pengeluaran pemerintah bidang kesehatan paling tinggi di Negara Brunei Darussalam terjadi pada tahun 1998 sebesar 4,46% sedangkan paling rendah pada tahun 1991 sebesar 2,05%.

Di negara Indonesia, masalah mengenai kesehatan dan pendidikan diatur dalam suatu peraturan perundangan. Pendidikan diatur dan diamanatkan dalam UUD tahun 1945, sedangkan kesehatan diatur dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu amanat dalam undang-undang tersebut adalah kewajiban memenuhi kebutuhan anggaran kesehatan melalui APBN dan APBD yang masing-masing sebesar 5% dan 10%. Dalam kenyataannya, setelah penetapan Undang-Undang tentang Kesehatan, pemerintah masih belum dapat memenuhi amanat mengenai pemenuhan anggaran kesehatan yang dimaksud.

Bank Dunia menyebut alokasi dana kesehatan Indonesia merupakan salah satu yang terendah di dunia. Posisi Indonesia hanya kalah dari Sudan Selatan, Chad, Myanmar, dan Pakistan. Anggaran kesehatan Indonesia saat ini hanya 1,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) (Bank Dunia, 2015). Padahal, peningkatan layanan kesehatan dasar merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kesehatan juga erat kaitannya dengan investasi besar di bidang sumber daya manusia.

Untuk negara Malaysia, pemerintah berkehendak untuk memperbaiki banyak sektor, termasuk perbaikan rumah sakit yang ada, membangun dan melengkapi rumah sakit baru, penambahan jumlah klinik umum, dan perbaikan pelatihan dan perluasan pelayanan jarak jauh. Bertahun-tahun lalu pemerintah telah memperkuat usaha untuk memutakhirkan sistem dan menggaet lebih banyak investor asing. Sistem kesehatan Malaysia memerlukan para dokter untuk melaksanakan tugas tiga tahun pelayanan di rumah sakit umum untuk meyakinkan sumber daya manusia rumah-rumah sakit itu tetap terjaga. Sebagian besar rumah

sakit swasta berada di perkotaan, dan tidak seperti banyak rumah sakit umum, dilengkapi dengan fasilitas diagnosis dan visualisasi terbaru.

Sedangkan untuk Pemerintah Brunei Darussalam dari pengeluaran yang ada digunakan untuk program pengobatan gratis, dimana Warga negara Brunei memiliki akses gratis untuk fasilitas kesehatan. Masyarakat disediakan asuransi kesehatan yang bisa digunakan untuk melakukan cek kesehatan, diagnosa, dan operasi kecil maupun besar secara gratis. Salah satunya terdapat di Rumah Sakit RIPAS dimana pengobatan dilakukan secara gratis.

4.2. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

4.2.1 Pengujian Model Penelitian

Analisis data pengaruh kemiskinan terhadap GDP perkapita, sumberdaya insani, investasi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan selama periode tahun 1991-2015 di negara mayoritas muslim ASEAN dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan model ekonometrika dengan teknik regresi data panel metode OLS. Pengolahan data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik yaitu program *software* Eviews 9. Adapun rumusan model yang digunakan adalah:

$$\text{Miskin} = \beta_0 + \beta_1 \text{GDPkap}_{it} + \beta_2 \text{SDI}_{it} + \beta_3 \text{Invest}_{it} + \beta_4 \text{Educ}_{it} + \beta_5 \text{Health}_{it} + e_{it}$$

Untuk memilih model yang akan digunakan dalam mengolah data panel dilakukan dengan uji formal. Pertama-tama kita melakukan dengan melakukan uji F (*Chow test*) untuk menentukan antara menggunakan metode Koefisien Tetap Antar Waktu dan Individu (PLS/*Common Effect*) atau metode efek tetap (MET/*fixed effect*), berikut ini adalah dari uji *Chow*.

Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Pool: SKRIPSI
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16.475549	(2,67)	0.0000
Cross-section Chi-square	29.999132	2	0.0000

Sumber: Lampiran

Dari Tabel 4.1 tersebut, terlihat bahwa nilai Prob. Cross-section F sebesar 0,0000 yang nilainya < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *Common Effect*.

Apabila seandainya hasil *chow test* memilih *fix effect*, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan uji Hausman untuk memilih *fix effect* atau *random effect*. Namun karena model tidak dapat diestimasi dengan metode efek random (*MER/ random effect*) maka uji hausman tidak dapat dilakukan. Hal ini karena dalam *software Eviews*, metode *random effect* hanya dapat digunakan dalam kondisi jumlah *cross section* lebih besar dibanding jumlah koefisien. Di sini terbukti bahwa saran-saran pemilihan *random effect* atau *fixed effect* bukanlah sesuatu yang mutlak. (Nachrowi, 2015, hlm. 327)

Selanjutnya kita mencoba melakukan uji LM untuk menentukan apakah akan memilih *common effect* atau *random effect*. Sebelumnya telah dihitung terlebih dahulu jumlah rata-rata kuadrat residual dan jumlah kuadrat residualnya, yang bisa dilihat dalam lampiran. Berikut ini adalah rumus untuk mencari LM hitung.

$$LM_{hitung} = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{T^2 \Sigma \bar{e}^2}{\Sigma e^2} - 1 \right]^2$$

n = jumlah negara

T = jumlah periode

$\Sigma \bar{e}^2$ = jumlah rata-rata kuadrat residual

Σe^2 = jumlah kuadrat residual

$$LM_{hitung} = \frac{4(25)}{2(25-1)} \left[\frac{25^2 (1.205650663)}{537.3281818} - 1 \right]^2$$

$$LM_{hitung} = 0.252968$$

Nilai LM hitung akan dibandingkan dengan nilai Chi Squared tabel dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebanyak jumlah variabel independent dan alpha atau tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila nilai LM hitung $>$ Chi Squared tabel maka model yang dipilih adalah RE, dan sebaliknya apabila nilai LM hitung $<$ Chi Squared tabel maka model yang dipilih adalah CE. Nilai Chi Squared tabel pada derajat kebebasan 5 dan alpha 5% nilainya 11.07045 dan nilai LM hitung sebesar 277,4094 sehingga lebih besar LM hitung dibandingkan Chi Squared tabel, maka model yang dipilih adalah model *common effect*.

Berdasarkan berbagai macam uji yang telah dilakukan tidak ditemukan penggunaan model yang paling tepat, mengingat uji hausman juga tidak dapat dilakukan. Hal seperti ini mungkin saja bisa terjadi, maka dari itu untuk menghindarinya maka perlu dipahami tujuan penggunaan regresi data panel, yaitu untuk mengakomodasi keberagaman *cross section* dan *time series*. Atas tujuan tersebutlah makanya ada fixed effect dan random effect sebagai alternative dari common effect yang menggunakan OLS.

Hal tersebut juga mungkin saja terjadi dikarenakan jumlah cross section dan time series yang ada. Jika T (jumlah data time series) adalah besar dan n (jumlah unit cross section) adalah kecil, kemungkinan akan ada sedikit perbedaan nilai parameter yang diestimasi oleh fixed effect dan random effect. Oleh karena itu, pemilihannya berdasarkan kenyataan perhitungan saja (Gujarati, 2015, hlm. 255). Jadi untuk memilih model mana model mana yang lebih baik, perlu lihat lagi tujuan penelitiannya. Jika keberagaman tidak menjadi bagian dari tujuan analisis, maka dapat menggunakan model common effect.

Sehingga model yang menguji pengaruh variabel-variabel yang terdapat dalam model dinamika Ibnu Khaldun terhadap tingkat kemiskinan digunakan metode biasa (*Pooled Least Square*). Adapun hasil analisis data dalam penelitian ini yang menggunakan model Common effect menggunakan *software* Eviews 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Analisis Data Model Common Effect

Dependent Variable: MISKIN?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 09/10/17 Time: 20:30
 Sample: 1991 2015
 Included observations: 25
 Cross-sections included: 3
 Total pool (balanced) observations: 75

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	39.00295	4.263865	9.147323	0.0000
GDPKAP?	-0.347463	0.104367	-3.329254	0.0014
HDI?	-0.358213	0.054773	-6.539915	0.0000
INVEST?	-0.054548	0.047647	-1.144838	0.2562
EDUC?	-0.706190	0.385710	-1.830883	0.0714
HEALTH?	-0.476689	0.941836	-0.506127	0.6144
R-squared	0.680947	Mean dependent var	9.599200	
Adjusted R-squared	0.657827	S.D. dependent var	5.060815	
S.E. of regression	2.960353	Akaike info criterion	5.085112	
Sum squared resid	604.6946	Schwarz criterion	5.270511	
Log likelihood	-184.6917	Hannan-Quinn criter.	5.159140	
F-statistic	29.45294	Durbin-Watson stat	0.424880	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Lampiran

Dari hasil output tersebut, diperoleh nilai R^2 sebesar 0.680947, atau 68,09%, yang artinya kemampuan variabel independen (GDPkap, HDI, inves, educ dan health) kuat dalam menjelaskan variabel dependen (miskin) di Negara mayoritas muslim ASEAN. Sedangkan nilai Adjusted R squared sebesar 0.657827 atau 65,78%, dalam model tersebut variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan perilaku variabel dependen (miskin) sebesar 65,78%, sedangkan sisanya 34,22% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Untuk menghindari adanya pengujian yang bias dan memenuhi asumsi BLUE (Beast, Linier and Unbiased Estimation), maka sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah situasi dimana terdapat korelasi variabel bebas antara satu variabel dengan lainnya. Dalam hal ini dapat disebut variabel-variabel tidak ortogonal. Variabel bersifat ortogonal adalah variabel yang nilai korelasi antara sesamanya sama dengan nol. Gujarati (2001, hlm. 166). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas maka perlu dilakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Dengan menghitung koefisien korelasi antarvariabel independen, apabila koefisien rendah maka tidak terdapat multikolinieritas, sebaliknya jika koefisien antar variabel independen tersebut koefisiennya tinggi ($>0,80$) maka diduga terdapat multikolinieritas. Berikut adalah hasil korelasi parsial antarvariabel independen.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	GDPKAP	HDI	INVEST	EDUC	HEALTH
GDPKAP	1	-0.43124	-0.16276	-0.01157	0.01580
HDI	-0.43124	1	0.31261	0.47064	0.44632
INVEST	-0.16276	0.31261	1	0.04586	0.15498
EDUC	-0.01157	0.47064	0.04586	1	0.82326
HEALTH	0.01580	0.44632	0.15498	0.82326	1

Sumber: Lampiran

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa terdapat variabel yang memiliki koefisien yang cukup besar, yaitu lebih dari 0,80, sehingga patut diduga adanya hubungan linier antar variabel tersebut. Sehingga kemudian di duga adanya multikolinieritas. Multikolinearitas akan tetap menghasilkan estimator yang BLUE karena masalah estimator yang BLUE tidak memerlukan asumsi tidak adanya korelasi antarvariabel independen. Rohmana (2013, hlm. 149). Dalam kasus model tersebut, peneliti tidak mempunyai pilihan selain tetap menggunakan model itu untuk dianalisis regresi walaupun mengandung masalah multikolinearitas.

4.2.2.2 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana faktor pengganggu tidak memiliki varian yang sama. Heterokedastisitas merupakan suatu fenomena dimana estimator regresi bias tetapi varian tidak efisien (semakin besar sampel semakin besar varian). Apabila asumsi itu tidak dapat dipenuhi maka dapat dikatakan terjadi penyimpangan. Penyimpangan terhadap faktor pengganggu tersebut adalah heterokedastisitas. Uji hereoskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

Konsekuensi logis dari adanya heteroskedastisitas adalah menjadi tidak efisiennya estimator OLS akibat variansnya tidak lagi minimum. Pada akhirnya dapat menyedatkan kesimpulan, apalagi bila dilanjutkan untuk meramalkan. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada jenis data cross section. Karena regresi data panel memiliki karakteristik tersebut, maka ada kemungkinan terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara membandingkan hasil antara model tanpa pembobotan (*unweighted*) dan model dengan pembobotan (*weighted*).

Cara untuk mengecek masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan membandingkan nilai jumlah kuadrat sisa (*sum of squared resid*) antara hasil estimasi dengan pembobotan dan tanpa pembobotan. Apabila nilai kuadrat sisa dengan pembobotan lebih rendah dibandingkan dengan nilai kuadrat sisa tanpa pembobotan maka hal ini menunjukkan bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas pada data awal. Berikut ini adalah perbandingan antara hasil estimasi dengan pembobotan dan tanpa pembobotan.

Tabel 4. 4 Hasil Estimasi Dengan Pembobotan

Dependent Variable: MISKIN?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
 Date: 09/10/17 Time: 20:37
 Sample: 1991 2015
 Included observations: 25
 Cross-sections included: 3
 Total pool (balanced) observations: 75
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	34.93795	4.061136	8.603000	0.0000
GDPKAP?	-0.313449	0.100136	-3.130216	0.0026
HDI?	-0.320247	0.050085	-6.394073	0.0000
INVEST?	-0.092670	0.039966	-2.318702	0.0234
EDUC?	-0.855814	0.352750	-2.426119	0.0179
HEALTH?	-0.135206	0.763060	-0.177189	0.8599
Weighted Statistics				
R-squared	0.662978	Mean dependent var	9.898315	
Adjusted R-squared	0.638556	S.D. dependent var	4.391819	
S.E. of regression	2.907219	Sum squared resid	583.1828	
F-statistic	27.14692	Durbin-Watson stat	0.425390	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.672653	Mean dependent var	9.599200	
Sum squared resid	620.4141	Durbin-Watson stat	0.407262	

Sumber: Lampiran

Berdasarkan hasil estimasi tersebut terlihat bahwa nilai *sum of squared resid* setelah pembobotan sebesar 583.1828 atau lebih kecil dibandingkan dengan nilai *sum of squared* tanpa pembobotan sebesar 620.4141, hal tersebut mengindikasikan adanya heteroskedastisitas pada data awal. Dengan dipergunakannya teknik estimasi menggunakan GLS tersebut secara otomatis model terbebas dari heteroskedastisitas dan autokorelasi mengingat estimator yang kita dapatkan mempunyai varian yang minimum atau efisien (Widarjono, 2007: 257). Setelah model tersebut bebas dari heteroskedastisitas, nilai R^2 sedikit menurun dari 67,26% menjadi 66,29%. Artinya, variabel independen (GDPkap, HDI, Inves, Educ, Health) mampu menjelaskan variable dependen (Miskin) di

Negara mayoritas muslim ASEAN sebesar 66,29% sedangkan sisanya 33,71% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

4.2.3 Pengujian Model Penelitian

Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier data panel dengan alat bantu menggunakan *software* Eviews 9, berdasarkan pengolahan data pada penelitian ini, persamaan yang didapat dari hasil estimasi dengan menggunakan data panel dengan model Koefisien Tetap Antar Waktu dan Individu (*Common Effect*). Adapun persamaan dengan metode PLS tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{MISKIN} = 34.93795 - 0.313449*\text{GDPKAP} - 0.320247*\text{HDI} - 0.092670*\text{INVEST} - 0.855814*\text{EDUC} - 0.135206*\text{HEALTH}$$

Berdasarkan hasil pengujian di atas, nilai konstanta sebesar 34.93795, artinya bahwa ketika variabel pertumbuhan GDP per kapita, HDI, investasi, pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan sebesar nol, maka tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN sebesar 34.93795 persen. Kemudian nilai koefisiensi pertumbuhan GDP per kapita sebesar -0.313449 yang berarti ketika pertumbuhan GDP per kapita rata-rata naik sebesar satu persen sementara variabel lain dianggap konstan, maka tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN rata-rata menurun sebesar 0.313449 persen. Kemudian untuk nilai koefisiensi HDI sebesar -0.320247 yang berarti ketika HDI rata-rata naik sebesar satu persen sementara variabel lain dianggap konstan, maka tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN rata-rata menurun sebesar 0.320247 persen. Selanjutnya nilai koefisiensi investasi sebesar -0.092670 yang berarti ketika investasi rata-rata naik sebesar satu persen sementara variabel lain dianggap konstan, maka tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN rata-rata menurun sebesar 0.092670 persen. Untuk nilai koefisiensi pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan sebesar -0.855814 yang berarti ketika pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan rata-rata naik sebesar satu persen

sementara variabel lain dianggap konstan, maka tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN rata-rata menurun sebesar 0.855814 persen. Dan yang terakhir untuk nilai koefisiensi pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan sebesar -0.135206 yang berarti ketika pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan rata-rata naik sebesar satu persen sementara variabel lain dianggap konstan, maka tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN rata-rata menurun sebesar 0.135206 persen.

4.2.4 Pengujian Hipotesis

4.2.4.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t statistik bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis dari data sampel. Uji t merupakan suatu prosedur yang mana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nul (H_0). Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel X secara individu mampu menjelaskan variabel Y.

Pengujian hipotesis dilakuna dengan kriteria apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 di tolak yang berarti adanya pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima yang berarti tidak adanya pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dalam model ini terdapat variabel yang signifikan dan terdapat pula variabel yang tidak signifikan apabila dilihat dari probabilitas yang dibawah nilai 5% dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Pengujian Hipotesis Secara Individu

Variabel	t_{hitung}		t_{tabel}	Keputusan	Pengaruh
GDPKAP	-3.130216	>	2.093024	Menolak H_0	Signifikan
HDI	-6.394073	>	2.093024	Menolak H_0	Signifikan
INVEST	-2.318702	>	2.093024	Menolak H_0	Signifikan
EDUC	-2.426119	>	2.093024	Menolak H_0	Signifikan
HEALTH	-0.177189	<	2.093024	Menolak H_a	Tidak Signifikan

Sumber: Lampiran, data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan di atas terlihat bahwa variabel GDP per kapita memiliki nilai t_{hitung} sebesar -3.130216 sedangkan t_{tabel} sebesar 2.093024 ($df = n - k = 25 - 6 = 19$) hal ini menandakan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa koefisien GDP per kapita berpengaruh secara signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kemiskinan. Dengan kata lain kenaikan GDP per kapita akan menurunkan angka tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN. Hal tersebut juga dapat diketahui dengan nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0.0026 atau ketidakyakinan sebesar 0,2% yang berarti lebih kecil dari $\alpha = 5\%$.

Untuk variabel HDI memiliki nilai t_{hitung} sebesar -6.394073 sedangkan t_{tabel} sebesar 2.093024 ($df = n - k = 25 - 6 = 19$) hal ini menandakan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa koefisien HDI berpengaruh secara signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kemiskinan. Dengan kata lain kenaikan HDI akan menurunkan angka tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN. Hal tersebut juga dapat diketahui dengan nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0.0000 atau ketidakyakinan sebesar 0% yang berarti lebih besar dari $\alpha = 5\%$.

Untuk variabel Investasi memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2.318702 sedangkan t_{tabel} sebesar 2.093024 ($df = n - k = 25 - 6 = 19$) hal ini menandakan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa koefisien Investasi berpengaruh secara signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kemiskinan. Dengan kata lain kenaikan investasi akan menurunkan angka tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN. Hal tersebut juga dapat diketahui dengan nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0.0234 atau ketidakyakinan sebesar 0,23% yang berarti lebih kecil dari $\alpha = 5\%$.

Kemudian untuk variabel pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2.426119 sedangkan t_{tabel} sebesar 2.093024 ($df = n - k = 25 - 6 = 19$) hal ini menandakan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa koefisien pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan berpengaruh secara signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kemiskinan. Dengan kata lain kenaikan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan akan menurunkan angka tingkat kemiskinan di negara

mayoritas muslim ASEAN. Hal tersebut juga dapat diketahui dengan nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0.0179 atau ketidakyakinan sebesar 0,18% yang berarti lebih kecil dari $\alpha = 5\%$.

Dan yang terakhir untuk variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0.177189 sedangkan t_{tabel} sebesar 2.093024 ($df = n - k = 25 - 6 = 19$) hal ini menandakan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} sehingga H_a ditolak dan H_o diterima yang berarti bahwa koefisien pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kemiskinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN. Hal tersebut juga dapat diketahui dengan nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0.8599 atau ketidakyakinan sebesar 86% yang berarti lebih besar dari $\alpha = 5\%$.

4.2.4.2 Pengujian Hipotesis Regresi Majemuk Secara Keseluruhan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian secara keseluruhan (Uji F) ini adalah apabila nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti ada pengaruh secara bersama-sama dari keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat. Begitupun dengan sebaliknya apabila nilai F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} maka H_o diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak ada pengaruh secara bersama-sama dari keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat. Tingkat keyakinan yang digunakan sebesar 95% atau residu sebesar 5% ($\alpha = 5\%$). Berikut perbandingan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} yang di peroleh.

Tabel 4. 6 Pengujian Hipotesis secara Keseluruhan (Uji F)

F_{hitung}		F_{tabel}	Keputusan	Pengaruh
27.14692	>	2.35	Menolak H_o	Berpengaruh Secara Keseluruhan

Sumber: Lampiran, data diolah

Berdasarkan pada Tabel 4.10 di ketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 27.14692 dan nilai F_{tabel} sebesar 2.35 (df numerator = $k-1 = 6-1 = 5$, df denominator = $n-k = 75-5 = 70$, dengan $\alpha = 5\%$). Hal ini menandakan bahwa F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} sehingga H_0 di tolak dan H_a diterima yang berarti bahwa seluruh variabel bebas yaitu pertumbuhan GDP perkapita, HDI, investasi, pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah disektor kesehatan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN. Hal tersebut juga dapat diketahui dengan melihat nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0.0000 atau ketidak yakinan sebesar 0% yang berarti lebih kecil dari $\alpha = 5\%$.

4.2.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau uji R^2 merupakan angka yang menunjukkan besarnya derajat kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan atau menerangkan variabel terikat dalam fungsi yang bersangkutan. Besarnya nilai R^2 diantara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Apabila nilai R^2 semakin mendekati satu maka kedekatan antara variabel bebas dan variabel terikat semakin dekat. Tetapi apabila nilai R^2 semakin mendekati nol maka kedekatan antara variabel bebas dan variabel terikat semakin jauh. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan eviews 9 didapat hasil koefisien determinasi sebesar 0.662978 atau sebesar 66,29% yang berarti dalam model tersebut, variabel pertumbuhan GDP perkapita, HDI, investasi, pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN sebesar 66,29% dan sisanya itu sebesar 33,71% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel diluar model.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Seperti yang telah kita pahami sebelumnya bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi ekonomi dimana seseorang memiliki penghasilan yang rendah sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara layak. Kemiskinan bukan hanya kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan

hidup pokok atau standar hidup yang layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut bagaimana keluarga miskin melakukan dan mengembangkan kegiatan perekonomiannya dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan. Islam sendiri tidak menghendaki adanya kemiskinan, sebab kemiskinan terkadang mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan haram yang tidak dibenarkan agama seperti mencuri, mencopet, menipu dan sebagainya.

Kemiskinan erat kaitannya dengan pembangunan, dimana salah satu indikator kesuksesan pembangunan dilihat dari jumlah kemiskinan. Pembangunan ekonomi bersifat multi dimensi dimana tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor lainnya. Seperti halnya teori yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun (dalam Hanafiah, 2008, hlm. 11) pembangunan merupakan proses multi dimensi yang tidak hanya melibatkan faktor ekonomi saja, melainkan pada variabel penting politik dan sosio ekonomi seperti Syariah (S), otoritas politik (G), manusia (N), harta benda atau kekayaan (W), pembangunan (g) dan keadilan (j). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Affandi, Akhmad & Astuti, D.P. (2013, hlm. 160) Variabel model dinamika Ibnu Khaldun berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia sebagai Negara mayoritas muslim. Dimana di Pakistan hanya variabel IPM yang berpengaruh signifikan signifikan. Sedangkan di India, variabel model dinamika Ibnu Khaldun variabel tersebut tidak signifikan.

Variabel-variabel dalam model pembangunan Ibnu Khaldun ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan manusia di dunia maupun akhirat agar manusia dapat terbebas dari kemiskinan. Variabel-variabel tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada sub selanjutnya.

4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan GDP Per Kapita terhadap Kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN Berdasarkan Model Dinamika Ibnu Khaldun

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan E-Views 9 menunjukkan bahwa hubungan antara GDP per kapita dengan kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN berdasarkan model dinamika Ibnu Khaldun adalah negatif yang

berarti apabila pertumbuhan GDP per kapita meningkat maka tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN akan menurun. Berdasarkan pengujian hipotesis secara individu di dapatkan hasil bahwa variabel pertumbuhan GDP per kapita berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian dalam penelitian ini variabel pertumbuhan GDP per kapita mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Pendapatan perkapita menggambarkan pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk warga negara tersebut, dengan naiknya pendapatan perkapita menandakan bahwa pendapatan masyarakat naik pula, naiknya pendapatan perkapita juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat menjadi aspek penting agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan minimal standar hidup layak (*basic needs*). Apabila daya beli masyarakat meningkat akibat adanya kenaikan pendapatan riil maka tentunya pengeluaran masyarakat dapat lebih meningkat dan lebih sejahtera, sebaliknya jika daya beli masyarakat lemah akibat rendahnya pendapatan riil maka akan menyebabkan masyarakat sulit memenuhi standar minimal hidup layak. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi standar minimal hidup layak tersebut berarti tidak mencapai garis kemiskinan sehingga menjadi masyarakat miskin atau dengan kata lain masuk dalam kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Implikasi dari adanya peningkatan daya beli masyarakat miskin yaitu keluarnya atau berkurangnya masyarakat miskin tersebut dari garis kemiskinan yang mana merupakan garis atau batas kebutuhan minimum hidup layak yang harus dipenuhi seseorang. Dengan begitu semakin besar naiknya pendapatan perkapita maka angka kemiskinan akan semakin berkurang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh H. Lopez & L. Servén (2005b, hlm. 116) bahwa kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, maka negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi harus tumbuh kurang pesat dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan rendah tujuannya agar semua menjadi sama. Dengan menggunakan model pertumbuhan standar ditambah untuk memasukkan ukuran kemiskinan yang sesuai di antara variabel planatory, Lopez & L. Servén

menemukan bahwa setelah mengendalikan faktor-faktor lain, kemiskinan memiliki dampak negatif dan sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang juga signifikan secara ekonomi. Rata-rata, kenaikan 10 persen dalam kemiskinan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 1 poin persentase.

Riset lain yang dapat mendukung hasil penelitian ini adalah Sumbayak, Dewanto & Falianty (2015, hlm. 5) pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB per kapita riil) telah terbukti memiliki pengaruh negatif (menurunkan) dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pada penelitiannya yang menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dari PDB per kapita menurutnya dinilai lebih mencerminkan kondisi perubahan perekonomian lapisan masyarakat atau kemajuan dari tingkat kesejahteraan masyarakat (*welfare*). Hal ini berarti dapat melihat sejauh mana adanya peningkatan dari pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat di suatu daerah. Oleh karena itu, apabila terjadi pertumbuhan PDB per kapita yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang tentu dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik terhadap kesejahteraan masyarakat.

Setiap tahunnya diharapkan bahwa pertumbuhan PDB dapat terus meningkat agar terjadi kemajuan perekonomian dan pada akhirnya tercermin secara riil dalam pendapatan masyarakat (PDB per kapita), sehingga pertumbuhan PDB harus dijaga agar terus mengalami kenaikan dan angkanya lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk, karena jika pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada pertumbuhan PDB maka pertumbuhan PDB tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, PDB per kapita yang terus bertumbuh dapat menjadi ukuran yang tepat dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut dinikmati oleh setiap masyarakat.

Tambahan penting lainnya yang disampaikan oleh Sumbayak, Dewanto & Falianty (2015, hlm. 9) bahwa apakah komponen PDB yang membuat terjadinya penurunan kemiskinan. Apakah dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur yang dihasilkan oleh peningkatan PDB merupakan komponen utama yang menurunkan kemiskinan? Ataukah meningkatnya jaringan keamanan sosial,

pelayanan kesehatan, atau pelayanan lainnya yang disebabkan oleh peningkatan PDB merupakan faktor pengentasan kemiskinan yang paling utama?

Perlu diperjelas dan diperhatikan pula, bahwa beberapa komponen belanja negara terkadang tidak atau belum mampu diserap secara maksimal oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga bisa saja penurunan kemiskinan ini belum maksimal adanya. Kurangnya penyerapan bisa diakibatkan oleh kurang baiknya kinerja pemerintah maupun oleh solusi pemerintah yang kurang tepat dalam mengatasi masalah.

4.3.2 Pengaruh Human Development Index (HDI) terhadap Kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN Berdasarkan Model Dinamika Ibnu Khaldun

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan E-Views 9 menunjukkan bahwa hubungan antara Human Development Index (HDI) dengan kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN berdasarkan model dinamika Ibnu Khaldun adalah negatif yang berarti apabila tingkat Human Development Index (HDI) meningkat maka tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN akan menurun. Berdasarkan pengujian hipotesis secara individu di dapatkan hasil bahwa variabel Human Development Index (HDI) berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian dalam penelitian ini variabel Human Development Index (HDI) mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian Suwandi (2016, hlm. 70) bahwa dalam penelitiannya menggunakan *human capital model* dan *research and development model*. *Human Capital Model* menyederhakan akumulasi modal dalam berbagai bentuknya seperti modal fisik, *human capital*, *health capital*, dan lain-lain yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Teori *Human Capital* juga menjelaskan bahwa seseorang dapat meningkatkan pendapatannya dengan memasuki pendidikan tinggi. Antara kedua model tersebut, *Human Capital Model* lebih baik digunakan karena pendidikan merupakan elemen utama modal manusia kemudian menjadi masuk akal jika digunakan sebagai manual untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan modal, peningkatan tenaga kerja terampil, tenaga kerja

tidak terampil, rata-rata tahun sekolah, dan pertumbuhan belanja pemerintah untuk pendidikan mengenai pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hendaknya tingkat pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang berkaitan, karena kesehatan individu pun akan mendorong untuk mencapai tingkat pendidikan.

Kebutuhan akan HDI sangat terkait dengan Millenium Development Goals (MDGS). Tujuan pembangunan milenium adalah bagian dari delapan kali tujuan pembangunan yang terikat untuk menangani masalah kemiskinan, pendidikan, gender, keadilan, kesehatan dan lingkungan (BKKBN). Pada umumnya, HDI dapat dijelaskan sebagai tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pakaian, makanan, rumah, pendidikan dan kesehatan. HDI juga dapat didefinisikan sebagai tingkat aksesibilitas seseorang dalam memiliki faktor produksi yang dapat mereka gunakan dalam proses produksi sehingga mereka mendapatkan kompensasi dari penggunaan bahan produksi tersebut. Berdasarkan hasil estimasi antara kemiskinan dan IPM menunjukkan bahwa kemiskinan memberi pengaruh negatif terhadap IPM (Esther Garga, 2015, hlm. 270).

Dampak kemiskinan itu serius terhadap HDI. Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan lebih sering mengalami masalah kesehatan yang terus-menerus, banyak bayi yang lahir memiliki berat badan rendah bahkan cacat mental dan fisik yang tidak dapat dipulihkan. Anak-anak yang terangkat dalam kemiskinan cenderung sering melewatkan sekolah karena sakit, memiliki tingkat kecelakaan lebih tinggi daripada anak-anak lain. Tingkat stres dalam keluarga juga telah ditunjukkan untuk berkorelasi dengan keadaan ekonomi. Studi tentang resesi ekonomi menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan dan kemiskinan berikutnya terkait dengan keluarga korban kekerasan, termasuk pelecehan anak dan orang tua. Keluarga miskin lebih merasakan stres daripada keluarga kelas menengah. Terlepas dari ketidakpastian keuangan, keluarga-keluarga ini secara emosional terpapar pada serangkaian kejadian negatif dan nasib buruk, termasuk penyakit, depresi, pengusuran, kurangnya pekerjaan, kriminalisasi kriminal, dan kematian keluarga. Orang tua yang mengalami masa-masa sulit ekonomi mungkin menjadi sangat sulit dihukum dan tidak menentu, mengeluarkan tuntutan yang didukung oleh penghinaan, ancaman, dan hukuman fisik.

4.3.3 Pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN Berdasarkan Model Dinamika Ibnu Khaldun

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan E-Views 9 menunjukkan bahwa hubungan antara investasi dengan kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN berdasarkan model dinamika Ibnu Khaldun adalah negatif yang berarti apabila investasi meningkat maka tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN akan menurun. Berdasarkan pengujian hipotesis secara individu di dapatkan hasil bahwa variabel investasi berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian dalam penelitian ini variabel investasi mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Menurut Sukirno (2000, hlm. 175) kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan investasi ini bersumber dari tiga fungsi penting yaitu investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja, penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Oleh karena itu, dengan adanya investasi mampu mengurangi kemiskinan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Anigbogu, dkk (2016, hlm. 19) bahwa investasi asing langsung (FDI) selama periode peninjauan telah efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Mayoritas negara-negara bahkan negara berkembang memandang bahwa FDI sebagai elemen penting dalam strategi pembangunan ekonomi mereka. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena investasi asing langsung dipandang sebagai penggabungan modal, teknologi, pemasaran dan manajemen. Bahkan, Ogunniyi dan Igberi (2014, hlm. 73) juga menyatakan bahwa FDI dapat menjadi alat pengentasan kemiskinan karena berfungsi sebagai suplemen untuk tabungan domestik dan seringkali disertai dengan keterampilan teknologi dan manajerial yang sangat diperlukan dalam

pembangunan ekonomi. Meskipun arus masuk FDI telah dikritik oleh para ilmuwan yang menuduh bahwa FDI pada perusahaan multinasional cenderung menemukan produksi di negara atau wilayah dengan upah rendah, pajak rendah dan standar lingkungan dan sosial yang lemah, namun walaupun mendapat kritik tersebut, negara lain menganggap bahwa manfaat FDI melebihi pernyataan para pengkritiknya.

Investasi langsung asing (FDI) dapat berkontribusi dalam berbagai cara menuju perkembangan ekonomi di negara berkembang, yang terpenting dengan memutus lingkaran setan kemiskinan. Sebenarnya, contoh negara Nigeria tetap merupakan paradoks yang menentang hipotesis ini. Negara ini memiliki banyak orang miskin yang hidup dalam banyak kabut. Dengan kata lain, negara ini memiliki sumber daya berlimpah, manusia dan material dengan banyak orang miskin.

Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Shaikh, F.M (2007, hlm. 11) bahwa FDI memiliki dampak signifikan pada populasi perkotaan dimana kemiskinan telah menurun karena investasi FDI yang besar di berbagai sektor. Hal ini terjadi karena penduduk perkotaan mendapatkan keuntungan dari FDI, lapangan kerja dan investasi yang besar di sektor yang berbeda-beda sehingga memberikan hasil positif bagi penduduk perkotaan dan ada perubahan signifikan dalam produksi dan konsumsi penduduk perkotaan.

Menurutnya, sangat penting mempertimbangkan dampak FDI terhadap pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan dilihat dari perbedaan antara dampak langsung dan tidak langsung. FDI dengan jelas melakukan kontribusi langsung seperti melalui pekerjaan terukur dan generasi yang tepat, namun dampak agregat yang dilihat dalam persyaratan ini sangat kecil, dan ini adalah kontribusi tidak langsung yang merupakan konsekuensi yang lebih besar. Dampak tidak langsung FDI untuk pembangunan ekonomi negara tuan rumah ditransmisikan melalui keterkaitan (mundur dan maju), *spillovers*, efek demonstrasi, dan sebagainya. Yang lebih penting adalah dampak langsung FDI yang lebih kualitatif terhadap keseluruhan spektrum masalah pembangunan manusia seperti pelatihan, pendidikan, kesetaraan gender, perumahan, perbaikan kesehatan, pengembangan masyarakat, dan sebagainya.

Berkeanaan dengan hal investasi, maka diperlukan adanya upaya untuk mendorong peningkatan investasi pemerintah yang proporsional dan lebih memihak kepada kepentingan publik sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi dan kebijakan yang mendorong masuknya investasi asing lebih besar lagi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.

4.3.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dibidang Pendidikan terhadap Kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN Berdasarkan Model Dinamika Ibnu Khaldun

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan E-Views 9 menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan di negara mayoritas muslim ASEAN berdasarkan model dinamika Ibnu adalah negatif yang berarti apabila tingkat pendidikan meningkat maka tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN akan menurun. Berdasarkan pengujian hipotesis secara individu di dapatkan hasil bahwa variabel pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian dalam penelitian ini variabel pendidikan mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh A. Edrees, Azali M, A. Hassan & N. Mohamed Nor (2015, hlm. 1-2) bahwa pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan dan kesehatan memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam hal ini pun tidak hanya mencerminkan pentingnya pembangunan manusia dalam mengurangi kemiskinan tetapi menunjukkan bahwa peran utama sektor pemerintah dalam hal pengurangan kemiskinan. Menurutnya, orang-orang yang berpendidikan dan sehat cenderung akan memiliki pekerjaan yang baik dengan gaji yang tinggi, sehingga semakin banyak investasi pada pendidikan dan kesehatan, tingkat kemiskinan dikurangi dengan hasil.

Pendidikan khususnya keaksaraan berkontribusi terhadap keuntungan kesehatan, rendahnya kemampuan, tingkat kelangsungan hidup bayi, produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, serta pertumbuhan PDB yang lebih cepat, tetapi juga memberi kontribusi pada integrasi sosial melalui melengkapi individu untuk berpartisipasi dalam keseluruhan kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya dan, dengan demikian, mengurangi kemiskinan. Namun, pendidikan dengan sendirinya tidak mengurangi kemiskinan tetapi melalui hal-hal yang mungkin mencerminkan peningkatan pendapatan dan kekayaan individu. Tingkat pendidikan individu juga memiliki dampak yang kuat terhadap kesejahteraan rumah tangga dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki dampak yang lebih tinggi dan meningkatkan manfaat bagi aktivitas sosial individu. Keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan cenderung meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi kemiskinan mereka dan memperbaiki kesehatan mereka dan meningkatkan produktivitas individu.

L. V. Omari & Willy Muturi (2016, hlm. 229) mengungkapkan pula bahwa pendidikan dikatakan dapat mencegah kemiskinan secara langsung melalui peningkatan upah dan meningkatnya kesempatan kerja. Kristjanson dkk (2010, hlm. 987) menetapkan bahwa pada 28 persen rumah tangga yang lolos dari kemiskinan, pendidikan memainkan peran penting dalam mendapatkan pekerjaan. Pendidikan meningkatkan nilai dan efisiensi angkatan kerja sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan kekuatan bekerja maka semakin rendah angka harapan masyarakat miskin dalam perekonomian tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa investasi melalui alokasi anggaran yang lebih tinggi ke sektor pendidikan perlu ditingkatkan dan bahkan diperlukan peningkatan lebih lanjut pada tingkat pendidikan tinggi, karena adanya implikasi yang luas dari MDGs diharapkan pendidikan akan mempengaruhi komposisi tenaga kerja dengan meningkatkan tingkat pendidikan rata-rata sehingga meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pendapatan diharapkan akan meningkat juga dan kinerja ekonomi secara umum diperkirakan akan meningkat. Efek totalnya adalah secara rata-rata pencapaian MDGs termasuk pemberantasan kemiskinan ekstrim.

Kemiskinan dapat dieliminasi dengan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, pengalaman dan kepuasan pekerja akibat

kemiskinan. Hasil penelitian tersebut telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu diantaranya to Millennium Development Goals (MDGs) and Education for All (EFA), Masood Sarwar, dkk (2011), Mursa (2007), Ravallion (2001). Mereka menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman berhubungan negatif dengan kemiskinan. Ketidaksetaraan gender juga diamati dan disarankan agar tingkat pendidikan dan kemiskinan pekerja yang lebih tinggi dapat diminimalkan.

Adanya hubungan positif antara pendidikan dan tingkat lapangan kerja atau angkatan kerja. Ditemukan bahwa pengangguran adalah karena kurangnya pendidikan, kurangnya kemampuan, kurangnya pengetahuan dan kualifikasi. Pendidikan memiliki nilai ekonomi yang sangat signifikan terhadap proses produktif yang kompleks, bahwa orang yang tidak mampu menghadapi pengangguran karena perusahaan tersebut meminta seorang pekerja teknik tinggi dan pendidikan tinggi. Pendidikan yang lebih baik memberikan kesempatan yang lebih baik, meningkatkan lapangan kerja, dan mengurangi risiko pengangguran.

Uniknya berdasarkan penelitian dari Zahid Ahmad & Tayyaba Batul (2013, hlm. 1) bahwa pendidikan umumnya dilihat sebagai fondasi masyarakat yang memiliki kekayaan ekonomi, kemakmuran sosial dan tatanan politik. Penelitian ini membantu untuk memahami keterkaitan jangka panjang antara kemiskinan, belanja pendidikan dan pendidikan. Penelitian tersebut tidak menemukan hubungan jangka panjang yang signifikan antara tingkat kemiskinan dengan belanja pendidikan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa meningkatkan alokasi anggaran untuk mendanai sektor pendidikan saja tanpa mengurangi tingkat kemiskinan, tidak cukup untuk memperbaiki status pendidikan negara. Oleh karena itu, peneliti menyarankan bahwa kebijakan harus dilakukan untuk meningkatkan tingkat melek huruf orang dewasa sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam hal ini.

4.3.5 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dibidang Kesehatan terhadap Kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN Berdasarkan Model Dinamika Ibnu Khaldun

Aspek pengeluaran pemerintah kedua yaitu di bidang kesehatan. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan E-Views 9 menunjukkan

bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dengan kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN berdasarkan model dinamika Ibnu Khaldun tidak berpengaruh signifikan. Yang berarti pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan tidak berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN. Hasil penelitian penulis kali ini memang berbeda atau tidak sesuai dengan teori yang telah dikemukakan atau penelitian-penelitian sebelumnya bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh untuk mengentaskan kemiskinan.

Secara umum, apabila kita lihat data pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan di Indonesia masih rendah namun analisis pengeluaran publik menunjukkan bahwa masalah utama dalam sektor kesehatan adalah alokasi sumber daya yang tidak merata dan tidak efisien. World Bank, (2007, hlm. 56). Karena alokasi yang tidak merata penduduk miskin memiliki akses yang sangat rendah terhadap layanan rumah sakit umum, sehingga mereka tidak mampu memanfaatkan anggaran yang telah disalurkan untuk layanan kesehatan. Indonesia sendiri masih berada pada posisi yang sangat rendah dalam hal angka kematian ibu, angka kematian anak dan gizi buruk. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan baru seperti peningkatan penyakit kardiovaskuler dan sejumlah penyakit epidemi seperti HIV/AIDS dan flu burung. Mahalnya layanan kesehatan bahkan di tingkat paling dasar juga menjadi masalah tersendiri, sehingga banyak masyarakat miskin yang mengabaikan kesehatan. Merini, (2013, hlm.3).

Walaupun pemerintah untuk sektor kesehatan di Indonesia masih rendah namun dalam dua dekade terakhir, peran swasta meningkat pada sektor kesehatan, investasi swasta lebih besar daripada investasi pemerintah yang terjadi hampir di semua negara Asia Tenggara kecuali Brunei Darussalam dan Thailand. Merini, (2013, hlm.4). Meningkatnya Meningkatnya investasi swasta tentu berdampak positif pada peningkatan layanan sektor kesehatan, namun hanya bisa dinikmati oleh masyarakat menengah keatas. Investasi swasta pada sektor kesehatan lebih cenderung pada layanan kesehatan sekunder dan tersier seperti pembangunan rumah sakit swasta dan penyediaan layanan kesehatan yang mengutamakan kenyamanan. Sedangkan akses layanan kesehatan primer yang menjadi kebutuhan

dasar kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin sebagian besar disediakan oleh pemerintah, disatu sisi pemerintah juga harus menyediakan layanan kesehatan sekunder dan tersier yang bisa dijangkau oleh masyarakat miskin.

Kasus yang berbeda terjadi di Malaysia, peran swasta yang cukup besar sebagai bagian dari privatisasi kesehatan membuat layanan kesehatan publik menjadi tertinggal jauh, banyak tenaga medis yang beralih dari sektor publik ke sektor swasta karena profit yang menggiurkan. Walaupun Malaysia termasuk negara dengan penghasilan menengah keatas, namun belum siap untuk melakukan privatisasi penuh seperti yang dilakukan oleh Singapore karena tidak didukung oleh program kesejahteraan untuk masyarakat kurang mampu. Pada akhirnya, Malaysia harus mengalokasikan anggaran kesehatan yang cukup besar untuk membiayai perawatan kesehatan bagi masyarakat miskin dan agar mampu bersaing dengan swasta.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yani Mulyaningsih (2008, hlm. 29) mengenai pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap kemiskinan yang menggunakan data panel metode MER (Metode Efek Random). Metode tersebut sudah dianggap paling tepat karena telah dilakukan proses perbandingan, pengujian, dan pemeriksaan model. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Kondisi ini tidak terlepas dari sistem keuangan negara yang nampak dari alokasi pengeluaran pemerintah dalam sektor publik (khususnya pendidikan dan kesehatan) terhadap total pengeluaran pemerintah yang relatif masih rendah. Alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik (khususnya pendidikan dan kesehatan) yang masih rendah tentu membuat masyarakat khususnya masyarakat miskin semakin sulit untuk memperoleh akses terhadap kesehatan dan tidak meratanya tingkat kesehatan masyarakat karena bagi masyarakat miskin akan memprioritaskan untuk bekerja dan kurang memperhatikan kesehatannya, sehingga tentunya membuat pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Terbatasnya akses-akses masyarakat miskin terhadap kesehatan menyebabkan ketidakmampuan untuk mengakumulasikan modal yang diperlukan

baginya untuk keluar dari jebakan kemiskinan (*poverty trap*), sehingga konsekuensi dari akibat minimnya akumulasi kapital tersebut, masyarakat miskin tidak mampu berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan merasakan berkah dari adanya pembangunan. Hal tersebut yang mendasari bahwa pembangunan manusia sangat penting, dimana dalam pembangunan manusia tersebut tidak hanya meliputi dimensi kesejahteraan saja melainkan terkait juga dengan peningkatan kapasitas dasar manusia melalui akses terhadap pendidikan dan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin.

Penelitian lain yang mendukung telah dilakukan oleh Fan, Zhang & Rao (2004, hlm. 47) di Uganda menemukan bahwa pengeluaran atau investasi untuk sektor kesehatan tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap penurunan kemiskinan di negara tersebut. Salah satu penjelasan yang diberikan adalah karena investasi kesehatan tersebut cenderung mempengaruhi pertumbuhan dan penurunan kemiskinan dalam jangka panjang, artinya dampak dari kesehatan akan terlihat setelah beberapa tahun kemudian, tidak dalam jangka pendek. Pengeluaran sektor kesehatan pada umumnya lebih banyak ditujukan pada upaya-upaya preventif, sehingga dampaknya baru akan terlihat dalam jangka panjang (*long-run*), dimana tidak memiliki pengaruh yang langsung terhadap penurunan kemiskinan, akan tetapi harus melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurutnya, yang harus diperhatikan pula oleh pemerintah mengenai pengeluaran publik bahwa persentase bidang kesehatan biasanya lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran yang lain, sehingga adanya perbedaan besar dalam pengaruh berbagai jenis belanja pemerintah terhadap pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, karena potensi keuntungan dari realokasi sumber daya pemerintah sangat besar.

Hal lain pun dikemukakan oleh Misdawita & Sari (2013, hlm. 155) bahwa hal yang harus diperhatikan mengenai pengeluaran pemerintah bidang kesehatan adalah apabila perbaikan kesehatan tidak disertai oleh peningkatan lapangan kerja dan tidak berpengaruhnya pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap kemiskinan dapat juga disebabkan karena semakin tingginya angka kelahiran dari masyarakat miskin akibat meningkatnya tingkat kesehatan mereka. Menurutnya, sehat saja tidak cukup untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu keluarga.

Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat miskin juga memerlukan program kerja pemerintah yang mendukung perluasan lapangan pekerjaan. Perbaikan kesehatan diiringi dengan perbaikan pendidikan dan penambahan lapangan pekerjaan dapat mengurangi kemiskinan dengan sangat baik. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan idealnya tetap diiringi atau berjalan bersama dengan program lain.